

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Sinar Grafika, Jakarta 2021,

Peter Mahmud dan Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012

Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung, 2016.

Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hubungan Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2016,

Sudrajat, Tedi. *Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan dan Jabatan*. Sinar Grafika, 2022,

W. J. S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Terbaru*, Balai Pustaka, Jakarta, 2013,

### B. Jurnal Ilmiah

Abdul Rokhim, Kewenangan Pemerintahan Dalam Konteks Negara Kesejahteraan (Welfare State), *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Dinamika Hukum* Vol 19 No 36 2013,

Alfian, Elvi. *Tugas dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Penegak Hukum*. *Legalitas: Jurnal Hukum* Vol.12 No.1 2020,

Ali Marwan. "Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." Vol 15 No 2 2019,

- Aris, Noor Halim. *Rekontruksi Peraturan Kepolisian Nomor 4 tahun 2020 Tentang Pengamanan Swakarsa Pada Anggota Satpam Berbasis Hak Asasi Manusia*. Diss. undaris, 2023.
- Astuti, Tri Sulistianing, and Luthfi Widagdo Eddyono, *Dinamika Pengaturan Dan Kepastian Hukum Kewenangan Pemerintah Pusat Atas Pengelolaan Pemanfaatan Tidak Langsung Panas Bumi*, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* Vol 11 No 3 2022,
- Bagus. Prasetyo, *Efektifitas Pelestarian Cagar Budaya dalam UndangUndang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya*. *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol.15 No.01 2018,
- Didik, Kurniawan. "Reformulasi Kewenangan Penyidikan oleh Kejaksaan Sebagai Pengendali Perkara (Dominus Litis)." (2023).
- Didin Wahyu Oktavianto and others, 'Rokok Ilegal Dan Pita Cukai Palsu Sebagai Kiabat Kenaikan Cukai Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana', 2021.
- Fadlian, Aryo. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis." *Jurnal Hukum Positum* 5.2 (2020)
- Febriyanto, Safrizy. *Pandangan ekonomi islam terhadap proses dan aktivitas lelang di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Yogyakarta*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2022.
- Gandi Fransiskus, *Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*, *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura* No 5 Vol 1 2016
- Indrayanto, Adi, John Burgess, and Kandy Dayaram, *A case study of transformational leadership and para-police performance in Indonesia*, *Policing: An International Journal of Police Strategies & Management* Vol.37 No.02 2014
- Konar Zuber, *Peranan Lembaga Polri Dalam Penegakan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Volume 15 Nomor 3, 2017

- Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, jurnal Gema Keadilan, Vol. 7 No 1, 2020
- Laurensius Arliman S., *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015
- Leano, Fadha, Windi Safitri, and Durrotun Nashihah. "Upaya Pencegahan Peredaran Rokok Ilegal Melalui Komunikasi Interpersonal di Warung Kecamatan Mejobo." *Jurnal Muria Pengabdian Masyarakat* 1.1 (2023):
- Muhammad Arif, *Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian*, Al-Adl: Jurnal Hukum Vol.13 No.1 2021
- Mustaqbal, Khairi. *Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak) di Pengadilan Agama Jember Perspektif Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023.
- Permana, Dicky Eka Wahyu, and Sanusi Sanusi, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Rokok Ilegal', *Hukum Responsif*, 12.1 (2021)
- Putrijanti, *Kewenangan serta obyek sengketa di peradilan tata usaha negara setelah ada uu no. 30/2014 tentang administrasi pemerintahan*, Masalah-Masalah Hukum Vol 44 No 4 2015
- Putra, Menra Lianjaya, Trisno Raharjo, and Yeni Widowaty. "Penanggulangan Tindak Pidana Oleh Bea Dan Cukai Jakarta Terhadap Penyelundupan Smartphone." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2.1 (2021)
- Rizal Mahfudloh , Pengendalian dan penegakan Hukum terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu Pleh Direktorat Jendral Bea Cukai dan Intansi Terkait Kota Surakarta ( 2017)
- Rusdi, Dina Rosdiana. "Peranan Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Pendapatan dan Belanja Negara." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 5.1 (2021).
- Nugraheni, Luly. *Efektivitas Penegakan Hukum dalam Operasi Gempur Rokok Ilegal di Wilayah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe*

*Madya Pabean C Purwokerto Tahun 2021*. Diss. Universitas Jenderal Soedirman, 2022.

Saragih, Fernando, Andika Putra, "*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Menyerahkan atau Menyediakan Barang Kena Cukai Berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Yang Tidak Dikemas Untuk Penjualan eceran Atau Tidak Dilekati Pita Cukai Atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai (Studi Putusan Nomor: 161/Pid. Sus/2018/PN Bit)*." (2022).

Salin, Ahmad Saiful Azlin Puteh, et al, *The role of Islamic ethics to prevent corporate fraud*, International Journal of Business and Society 18.S1, 2017,

Soekanto, Soerjono. "Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat." (2007).

Widi, Widi Pregiati. "Penerapan Sanksi Terhadap Penjual Rokok Impor Tanpa Pita Cukai di Kota Pekanbaru Berdasarkan UU No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai." *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW* 6.2 (2023): 184-197.

Yasinta, Risma Alfariani, et al. "Analisis Yuridis Akibat Hukum Rokok Ilegal Terhadap Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai." *Jurnal Hukum dan Administrasi Publik* 1.2 (2023): 57-70.

### **C. Internet**

Direktorat Jenderal Bea dan Cuka, Sulaiman Didi Mujahidin, 'Pengertian Dan Jenis Rokok Ilegal', 2022 <<https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/apa-itu-rokok-ilegal-76df3ca4/detail/>>.

### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Negara Republik Indoneisa Tentang Peraturan Tindak Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Negara Republik Indoneisa Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Negara Republik Indoneisa Tentang Kepolisian Negara Republik Indoneisa

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Negara Republik Indoneisa Tentang  
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Dan  
Rokok Ilegal

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Negara Republik Indoneisa Tentang  
Cipta Kerja Yang Mengatur Tentang Perdagangan Ilegal